

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BATU DALAM  
MENINGKATKAN PARIWISATA DI ERA NEW NORMAL  
(Studi Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana**

**ADMINISTRASI PUBLIK**



**Oleh**

**JEKI KABATA**

**NIM: 2016210083**

**KOMPETENSI KEBIJAKAN PUBLIK  
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI  
MALANG**

**2021**

## **RINGKASAN**

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan implementasi kebijakan pemerintah kota Batu dalam meningkatkan pariwisata di era new normal. Penelitian ini digunakan untuk memudahkan peneliti dalam mengetahui kebijakan pemerintah kota Batu meningkatkan pariwisata.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan indikator yang menjadi keunggulan, permasalahan, peluang dan ancaman sebagai Wisata Kota Batu; hasil analisis menentukan strategis yang digunakan di Kota Batu. Paradigma penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan rancangan studi kasus. Data penelitian diperoleh dengan melakukan wawancara dan dokumentasi.

Hasil analisis menunjukkan bahwa Wisata Kota Batu memiliki berbagai ancaman yang belum tercapainya indikator pencapaian visi. Segi kekuatan terdiri dari pencapaian sebagai visi Kota Wisata Internasional. Segi peluang berasal dari lingkungan eksternal, dan segi ancaman berasal dari eksternal seperti Kota Wisata sejenis tetapi Kota Wisata ini masih memiliki kekuatan dari segi internal. Dari hasil rumusan analisis tersebut mengarah pada strategi diversifikasi produk. Wisata Kota Batu mengkolaborasikan daya tarik Wisata Budaya dan Wisata Alam pada setiap abstraksinya, dan penambahan hasil potensial seperti transaksi dan perbaikan diversifikasi peningkatan Wisata. Di Kota Batu dimaksudkan tidak mengubah tetapi menambah keragaman tempat Wisata yang telah ada untuk menghindari kejenuhan wisatawan dan menambah aset pendapat masyarakat Kota Batu.

***Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Pariwisata, New Normal***

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sistem pembangunan yang berada di NKRI sebagaimana yang berkaitan dengan kepariwisataan dari berbagai jenis pembangunan nasional yang dapat dilakukan secara berkepanjangan sebagaimana dengan tujuan untuk dapat turut serta untuk mewujudkan peningkatan secara kepribadian serta pengembangan SDM yang berada di NKRI. Dalam melaksanakan pengembangan yang berkaitan dengan pariwisata sebagaimana dapat melaksanakan sebuah kegiatan dalam bentuk komprehensif serta mampu untuk dapat memaksimalkan kekayaan SDA serta lingkungan secara geografis dengan tujuan adalah untuk dapat mensejahterakan masyarakat. Sebagaimana yang dituangkan dalam UU Tahun 2009 No 10 Pasal 8 yang berkaitan dengan pariwisata ialah sebuah mekanisme pembangunan dalam bentuk kepariwisataan seharusnya dapat dilaksanakan berlandaskan pada RIPK atau sering dikenal dengan nama Rancangan Induk Kepariwisataan yang dapat dilaksanakan serta dapat pula digolongkan menjadi beberapa bagian antara lain : RIPK baik itu dalam kota maupun Kabupaten.

Berdasarkan pada sebuah aturan dan beberapa kebijakan Pemerintah Negara Indonesia yang berkaitan dengan pariwisata, sehingga pihak pemerintah yang berada di Kota Batu sedang melakukan berbagai jenis kebijakan dengan tujuan untuk dapat memaksimalkan pembangunan yang mana lebih spesifiknya pada kepariwisataan. Adapun salah satu misi yang dimiliki oleh pemda Kota Batu ialah untuk dapat memaksimalkan pembangunan yang fokusnya pada pariwisata serta

kualitas terhadap SDM sebagaimana dengan tujuan untuk dapat menjemput perkembangan yang secara meluas. Adanya sebuah tindakan upaya dalam mengembangkan pembangunan dalam hal ini pariwisata yang berada di Kota Batu dapat dikatakan jauh lebih berkembang terutama dari aspek pembangunan pariwisata. Dimana pembangunan dapat didefinisikan sebagai salah satu pembangunan yang berkepanjangan serta dapat dijadikan sebagai salah satu landasan ialah pro demi lingkungan berkelanjutan, pro berkaitan dengan tingkat kesejahteraan keadilan sosial, dan pro lingkungan hidup (Sutisna, 2006). Dalam mendorong keseluruhan kegiatan yang ada maka seharusnya perlu dapat dilakukan sebuah kebijakan antara lain sistem gotong royong yang jauh lebih efisiensi dalam menunjang sistem pembangunan kepariwisataan serta tingkat kesejahteraan terhadap lapisan masyarakat. Apabila sebuah tindakan yang berkaitan dengan kebijakan sehingga dapat melakukan serta dapat pula untuk melibatkan beberapa pihak baik itu swasta maupun pemerintah, oleh karena itu dapat pula dipastikan untuk dapat pelaksanaan yang lebih baik.

Banyak permasalahan yang terjadi di Kota Batu, permasalahan ini timbul karena adanya Covid-19 yang menyebabkan kemiskinan meningkat dan penutupan setiap sektor wisata-wisata alam maupun seperti Jatim-park dan tempat wisata lainnya di buka pun tidak akan ada yang berkunjung, pandemi ini telah membuat banyak warga yang menggantungkan mata pencaharian di sektor pariwisata yang kehilangan pekerjaan sehingga menyebabkan kemiskinan semakin meningkat (Ramadhan, 2020). Berdasarkan latar latar belakang yang ada, sehingga dalam riset ini peneliti tertarik untuk dapat melakukan sebuah riset dengan topik “

Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Batu Dalam Meningkatkan Pariwisata Di Era New Normal’.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Sebagaimana telah dibahas pada latar belakang yang ada, sehingga dalam riset ini rumusan masalah yang akan diangkat ialah :

1. Bagaimana mengimplementasikan sebuah kebijakan pemerintah Kota Batu Tahun 2020 No 56 dalam meningkatkan pariwisata di era new normal ?
2. Faktor apa saja yang menjadi penganjal serta pendorong dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan pemerintah Kota Batu Tahun 2020 No 56 dalam meningkatkan pariwisata di era new normal ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Sebagaimana telah dibahas pada rumusan masalah yang ada, sehingga dalam riset ini rumusan masalah yang akan diangkat ialah :

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah Kota Batu dalam meningkatkan pariwisata di era new normal.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penganjal serta pendorong dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan pemerintah Kota Batu Tahun 2020 No 56 dalam meningkatkan pariwisata di era new normal

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Secara akademis sehingga secara langsung akan dapat meningkatkan pemahaman terhadap peneliti yang lebih khususnya pada implementasi dalam meningkatkan pariwisata di era new normal
2. Secara teoritis, dapat melatih diri dalam mengembangkan pemahaman dan dapat berguna bagi keilmuan Administrasi Publik tentang implementasi kebijakan pemerintah Kota Batu untuk meningkatkan pariwisata di era new normal
3. Secara praktis

- a. Bagi peneliti

Hasil dari riset ini akan selalu diharapkan untuk dapat memperkaya pemahaman peneliti dan akan pula dijadikan sebuah bahan masukan terhadap lapisan mahasiswa lebih khususnya pada keilmuan administrasi publik dalam mempersiapkan mental untuk menghadapi dunia kerja

- b. Bagi Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kota Batu.

Hasil dari riset ini akan selalu diharapkan untuk dapat dijadikan sebuah bentuk untuk mengimplementasikan Kebijakan Pemerintah Kota Batu Untuk Meningkatkan Pariwisata Di Era New Normal dalam meningkatkan pariwisata di era new normal.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Agustino, Leo. 2014. Dasar – Dasar Kebijakan Publik. Bandung: ALFABETA.
- Moleong, Lexy J. 2017. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sedarnayanti. 2013. Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemerintahan Yang Baik). Bandung: Reflika Aditama.
- Setyawan, Dodi. 2017. Pengantar Kebijakan Publik. Malang: Intelegensia Media.
- Sugiono. 2015. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: ALFABETA.
- Suharto, Edi. 2013. Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik. Bandung: ALFABETA.
- Suryono, Agus. 2010. Dimensi –Dimensi Prima Teori Pembangunan. Malang : UB Press.
- Sutisna, N. 2006. Enam Tolak Ukur Pembangunan Berkelanjutan. Jakarta : Regional Development Institusi.
- Ven Meter, D. S. dan Van horn, C. E. 1978. The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. Administration and Socoeity.
- West, Richard & Turner, Lynn H. 2008. Introducing Communication Theory: Analysis and Application, 3<sup>rd</sup> ed. (Pengantar Teori Komunikasi) : Analisis dan Aplikasi, Edisi 3. (Terjemahan Maria Natalia D.M). Jakarta: Salembah Humanika.

### Jurnal:

- Obot, Filipus dan Dody Setyawan .2017. Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Batu dalam Mewujudkan Kota Pariwisata Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol. 6, No. 3. Malang.
- Ramdhani, Abdulah & Ramdhani, Muhammad Ali. 2017. Konsep Umum Kebijakan Publik. Jurnal Publik, Vol. 11, No. 1: 1-12, ISSN : 1412-7083.
- Sari, Yulinda A, 2019: “*Partisipasi Masyarakat Dalam Penguatan Kebijakan Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Pesisir Barat*”. Jurnal Public, Vol 6. No.2 Malang.
- Widi Lestari, asih dan Firman Firdausi. 2017. Peran Pemerintah Kota Batu dalam Implementasi Kebijakan Pariwisata Berdasarkan Paradigma Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Devolepment). Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik. Vol. 30. No 3. Malang.

### Internet:

- Kurniawati, Rina. 2013. Modul Pariwisata Berkelanjutan. (online), (<https://rinakurniawati.files.wonderpress.com/2013/01/modul-pariwisata-berkelanjutan.pdf>, diakses 30 Desember 2020)

Ramahdan, Lucky Aditya. 2020. Hotel Dan Vila Di Kota Batu Tutup Semua Selama Pandemi Corona. Malang: Beritajatim (online), <https://beritajatim.com/pendidikan-kesehatan/hotel-dan-vila-di-kota-batu-tutup-semua-selama-pandemi-corona/> Diakses 23 April 2021.

**Undang – Undang:**

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan.

Peraturan Wali Kota Batu Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu.

Peraturan Wali Kota Batu Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 Dalam Status Transisi Darurat Dan Pengendalian.